

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang – undang. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan (Mardiasmo, 2016:26).

Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia, capaian realisasi pendapatan negara terus menurun dari tahun ke tahun. Puncaknya Indonesia mengalami *shortfall* pendapatan negara pada tahun 2014 sampai 2016. Pada tahun tersebut pendapatan negara hanya mencapai 85,61% dari target 1.751,3 triliun rupiah. Pendapatan negara juga lebih rendah dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan negatif sebesar -2,73%. Padahal pendapatan negara sebenarnya telah ditopang dari surplusnya PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dan Hibah sebesar 14,3%. Pajak memang menjadi kunci bagi pencapaian target pendapatan negara. Tercatat pada tahun 2015 sebesar 79,93% pendapatan negara berasal dari pajak dalam negeri. Oleh karena itu jika penerimaan pajak tidak sesuai target dampaknya akan besar terhadap tidak tercapainya realisasi pendapatan negara. Sumber : www.kemenkeu.go.id

Melalui UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan tahun 2008 pemerintah memberikan insentif berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan menjadi 28% pada tahun 2009 dan akan menjadi 25% pada tahun fiskal 2010. Para pelaku usaha akan mendapatkan tambahan potongan 5% jika Wajib Pajak Badan tersebut merupakan Wajib Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dengan minimal 40% kepemilikannya diperdagangkan di Bursa Efek

Indonesia. Akan tetapi optimalisasi penerimaan PPh Badan dalam praktiknya mengalami hambatan dalam bentuk ketidak patuhan wajib pajak. Rendahnya penerimaan pajak menyebabkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau *tax ratio* Indonesia hanya mencapai 10,3% dan merupakan rasio terendah di dunia yang rata-rata 15%. Pemerintah menargetkan *tax ratio* sebesar 10,9% pada tahun 2017. Kepatuhan dan kesadaran masyarakat membayar pajak diperlukan untuk mendongkrak penerimaan negara dari pajak. Meskipun sangat signifikan, masih banyak potensi pajak yang belum terkoleksi selama ini, misalnya pengusaha pertambangan yang bayar pajak masih kurang dari 50%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal, padahal Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi dikarenakan besarnya jumlah kegiatan usaha.

<http://id.beritasatu.com/home/penerimaan-pajak-2017/161467>

Tax avoidance adalah sebagai salah satu upaya perlawanan pajak aktif, yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Metode dan teknik yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Besarnya *tax avoidance* dapat dilihat dari perbandingan antara kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak (*Cash Effective Rate/ CETR*) (Tika,2017). Persoalan penghindaran atas beban pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Disatu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, tapi di sisi yang lain hal ini tidak diinginkan. *Tax avoidance* adalah upaya meminimalkan beban pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajibpajak karena dilakukan dengan cara- cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan celah- celah atau kelemahan- kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan (Kartika,2017).

Perusahaan manufaktur dipilih karena perusahaan manufaktur sebagai salah satu wajib pajak sering difokuskan dalam pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak, karena pada tahun 2012 terdapat 4000 perusahaan penanaman modal asing yang melaporkan namun tidak memiliki besaran pajak yang terutang karena mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut (Prakosa, 2014). Di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan manufaktur yang telah tercatat dibagi menjadi beberapa sektor. Salah satu dari sektor tersebut yaitu sektor industri barang konsumsi. Dalam penelitian ini, peneliti memilih sektor industri barang konsumsi, karena sektor ini dianggap bisa bertahan dalam krisis global, terutama industri makanan dan minuman. Sektor industri barang konsumsi erat kaitannya dengan kebutuhan pokok manusia karena produknya dapat langsung dinikmati oleh konsumen tanpa harus jatuh ketangan produsen terlebih dahulu. Secara tidak langsung, sektor ini dapat mempresentasikan seberapa besar tingkat konsumtif masyarakat. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih spesifik dimana letak perbedaan dalam mengoptimalkan labanya, salah satunya adalah dengan melakukan pengurangan biaya pajak yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Keterlibatan perusahaan dalam *tax avoidance* menjadi suatu hal yang biasa dan legal dilakukan oleh perusahaan, namun hal tersebut sangat tidak diinginkan oleh pemerintah. Pemerintah mengharapkan perusahaan membayar pajaknya tanpa menggunakan mekanisme penghindaran pajak.

Fenomena mengenai pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan (Cahyono et al, 2016).

Koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Forum Pajak Berkeadilan juga menyatakan bahwa fenomena terungkapnya banyak individu dan perusahaan yang diduga terkait upaya penghindaran pajak. Panama Papers menunjukkan bahwa dunia sudah berada di era darurat kejahatan pajak. Hal ini harus menjadi momentum bagi Pemerintah Indonesia untuk segera membasmi praktik penghindaran pajak, pengelakan pajak dan praktik pencucian uang oleh wajib pajak Indonesia, baik perorangan maupun badan hukum. [Sumber : republika.co.id](http://republika.co.id) . Indonesia Masuk Peringkat ke-11 terbesar Penghindaran Pajak Perusahaan dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di [Indonesia](http://www.tribunnews.com) ke Dinas Pajak [Indonesia](http://www.tribunnews.com). <http://www.tribunnews.com>

Dalam penelitian ini, konflik terjadi pada kepentingan laba perusahaan antara fiskus sebagai *principal* dan manajemen perusahaan sebagai *agent*. Adanya penyetoran sebesar-besarnya dari penerimaan pajak di inginkan oleh fiskus sedangkan laba yang signifikan dengan biaya pajak yang minimum di inginkan oleh pihak manajemen perusahaan (Prakosa, 2014). (Agus sartono 2015: 10) secara teoritis hampir semua manajer keuangan setuju terhadap tujuan memkasimumkan kemakmuran pemilik perusahaan. Tetapi dalam kenyataannya mereka juga berkepentingan terhadap kemakmuran individu, *agency conflict* dapat terjadi antar manajemen dengan pemegang saham karena pihak masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dalam usaha memaksimalkan nilai perusahaan dimana masing-masing pihak hanya mementingkan kepentingan pribadi saja. Oleh sebab itu, transparansi informasi perlu dilakukan perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* dan membuat *tax avoidance* itu tinggi karena adanya variabel yang di duga mempengaruhi yaitu *corporate social responsibility*, Karakter eksekutif, *sales growth*, manajemen laba dan ukuran perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan, karena CSR merupakan tindak lanjut dari komitmen perusahaan untuk bertindak etis dan

berkontribusi untuk pengembangan ekonomi. Ditinjau dari sudut Pajak Penghasilan (PPH), perusahaan biasanya akan memilih strategi untuk mensiasati pengenaan pajak ini sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR yang dilakukan dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak. Pada dasarnya perusahaan dituntut untuk mampu bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya terhadap para stakeholder. (Dewi dan nanik,2017)

Selain CSR faktor lain yang dapat mempengaruhi aktifitas *tax avoidance* yaitu karakter eksekutif. *Tax avoidance* yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pemimpin perusahaan yang bersifat risk taker akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi. Selain itu pemilik karakter ini juga tidak ragu dalam melakukan pembiayaan yang berasal dari hutang untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat. (Muhammmad Fajri et all,2015)

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* yaitu pertumbuhan penjualan (*sales growth*) juga dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*. *Sales growth* yang meningkat sangat besar kemungkinan akan lebih dapat meningkatkan pula kapasitas operasi perusahaan karena dengan peningkatan *sales growth* maka perusahaan akan memperoleh profit yang semakin meningkat pula. Kesimpulannya, secara logika apabila *sales growth* meningkat, maka perusahaan cenderung mendapatkan profit yang semakin besar pula sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula. (Dewinta & Setiawan, 2016)

Faktor berikutnya yang dapat memengaruhi aktivitas *tax avoidance* adalah manajemen laba yaitu suatu intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi (Schipper, 1989). Munculnya praktik manajemen laba yang mempengaruhi besar kecilnya pembayaran pajak yang dilandasi oleh motivasi pajak. Scott

(2009) menjelaskan dalam motivasi pajak, manajer melakukan praktik manajemen laba untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

Faktor berikutnya yang dapat memengaruhi aktivitas *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Total aktiva yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan sehingga semakin besar total aktiva yang dimiliki perusahaan maka akan meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan tersebut. Hal ini juga yang berdampak pada laba perusahaan yang semakin meningkat dan memengaruhi tingkat pembayaran pajak. Rego dan Wilson (2009) menemukan dalam penelitiannya bahwa semakin besar perusahaan mengindikasikan bahwa transaksi yang terjadi menjadi lebih kompleks. Ini mengakibatkan perusahaan memanfaatkan peluang yang ada dalam setiap transaksinya demi usaha *tax avoidance*.

Penelitian sebelumnya *terkait tax avoidance* menggunakan yang instrumen hutang dan memainkan biaya adalah Nurul Hidayati, et al, (2017) menyatakan bahwa *Corporate social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Muhammad Fajri Saputra, et al, (2015) menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini semakin eksekutif bersifat risk taker maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Budiman dan Setiyono (2012) yang menjelaskan bahwa *sales growth* berpengaruh signifikan pada CETR yang merupakan indikator dari adanya aktivitas *tax avoidance*. Imron Septiadi (2015) menyatakan bahwa Manajemen laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Menurut Surbakti (2012) ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perpajakan dengan melakukan *tax saving* yang dapat memasukan *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, et al, (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak

berpengaruh pada *tax avoidance*, perusahaan besar akan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga mereka sering menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil antara pengaruh *corporate social responsibility*, karakter eksekutif, *sales growth*, manajemen laba dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu dilakukan pengujian kembali terhadap variabel bebas tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *tax avoidance*. Dengan memperhatikan kondisi di atas, penelitian ini mengangkat pertanyaan penelitian dengan judul : **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hasil yang konsisten atas variabel bebas yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil antara pengaruh *corporate social responsibility*, karakter eksekutif, *sales growth*, manajemen laba dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini juga untuk melihat bagaimana pengaruh variabel bebas tersebut mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkap sebelumnya, maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Apakah *Corporate Social Responsibility (CSR)*, karakter eksekutif, *sales growth*, manajemen laba dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* ?

2. Bagaimana pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *tax avoidance* ?
3. Bagaimana pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* ?
4. Bagaimana pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance* ?
5. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.4.1 Ruang Lingkup Subjek

Subjek penelitian ini adalah *corporate social responsibility* (CSR), Karakter Eksekutif, *Sales Growth*, manajemen laba, ukuran perusahaan dan *tax avoidance*.

1.4.2 Ruang Lingkup Objek

Objek yang dipilih pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016.

1.4.3 Ruang Lingkup Tempat

Ruang lingkup tempat dalam penelitian ini yaitu Bursa Efek Indonesia, melalui penelusuran data sekunder.

1.4.4 Ruang Lingkup Waktu

Waktu penelitian ini adalah sejak pengambilan skripsi dalam waktu yang di tentukan November 2017 sampai Februari 2018

1.4.5 Ruang Lingkup Ilmu

Pada penelitian ruang lingkup ilmu yang di gunakan adalah Teori keagenan (*agency theory*) dan teori Sinyal (*signalling theory*).

1.5 Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), karakter eksekutif, *sales growth*, manajemen laba dan ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.

2. Untuk menganalisis pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan : Dapat dijadikan sebagai panduan dalam melakukan manajemen pajak, yang sesuai dengan prinsip tax avoidance sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu dapat dijadikan referensi akan pentingnya manajemen pajak, sehingga pajak terutang perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi kepada manajemer agar lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan perusahaan, terutama mengenai kebijakan perpajakan perusahaan dalam hal pengurangan beban pajak yang terutang yang nanti nya akan memicu kebangkrutan.
2. Bagi penulis selanjutnya : Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pembanding untuk penelitian berikutnya dengan topik sejenis yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* serta dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai penelitian ini maka penulis membuat sistematika penulisan penelitian secara sistematis dan singkat dengan membagi dalam lima bab, berikut penjelasan mengenai masing-masing bab:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini tercantum latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis / peneliti. Apabila penelitian memerlukan analisa statistika maka pada bab ini dicantumkan juga teori statistika dan hipotesa (bila diperlukan).

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, mahasiswa mendemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman daya pikirnya dalam menganalisis persoalan yang dibahasnya, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada BAB II. Mahasiswa diharapkan dapat mengemukakan suatu gagasan/rancangan/model/ teori baru untuk memecahkan masalah yang dibahas dengan tujuan penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan rangkuman dari pembahasan, yang sekurang-kurangnya terdiri dari; (1) jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis; (2) hal baru yang ditemukan dan prospek temuan; (3) pemaknaan teoritik dari hal baru yang ditemukan.

Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis. Sekurang-kurangnya memberi saran bagi perusahaan (objek penelitian) dan penelitian selanjutnya, sebagai hasil pemikiran penelitian atas keterbatasan penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Dalam daftar pustaka menjelaskan mengenai sumber informasi yang di peroleh yang di jadikan referensi sebagai pembahasan skripsi ini

LAMPIRAN

Dalam lampiran menjelaskan mengenai data yang mendukung atau yang memperjelas pembahasan pada skripsi ini.